



K-Rice Belt sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan di Kawasan Afrika 2023

Nabilah Putri Syahrial¹⁾, Amanda Feradatuz Zahra²⁾, I Gusti Ayu Anjely Gandawati³⁾, Helga Yohana Simatupang⁴⁾

Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

22044010078@student.upnjatim.ac.id¹⁾

22044010050@student.upnjatim.ac.id²⁾

22044010087@student.upnjatim.ac.id³⁾

helgayohana.fisip@upnjatim.ac.id⁴⁾

Abstrak

Krisis ketahanan pangan global yang semakin mengkhawatirkan mendorong berbagai negara untuk memperkuat kerja sama internasional di sektor pertanian, termasuk Korea Selatan melalui inisiatif *K-Rice Belt* pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inisiatif *K-Rice Belt* sebagai instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam kerja sama pertanian di Afrika tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data, serta analisis data kualitatif terhadap berbagai sumber dokumentasi, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori bantuan luar negeri yang dikembangkan oleh Lancaster sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *K-Rice Belt* merupakan instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan yang bersifat multidimensional, mencakup tujuan diplomatik dalam memperkuat posisi Korea Selatan sebagai negara *pivotal* global di Afrika, tujuan pembangunan dan kemanusiaan melalui transfer teknologi pertanian kepada delapan negara mitra, serta tujuan komersial melalui pembangunan ekosistem pertanian berbasis teknologi Korea di kawasan Afrika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *K-Rice Belt* mencerminkan strategi Korea Selatan dalam memanfaatkan keunggulan komparatifnya di sektor pertanian sebagai modal untuk memperkuat pengaruh internasionalnya di Afrika.

Kata kunci: Afrika, Bantuan luar negeri, *K-Rice Belt*, Kebijakan luar negeri, Korea Selatan

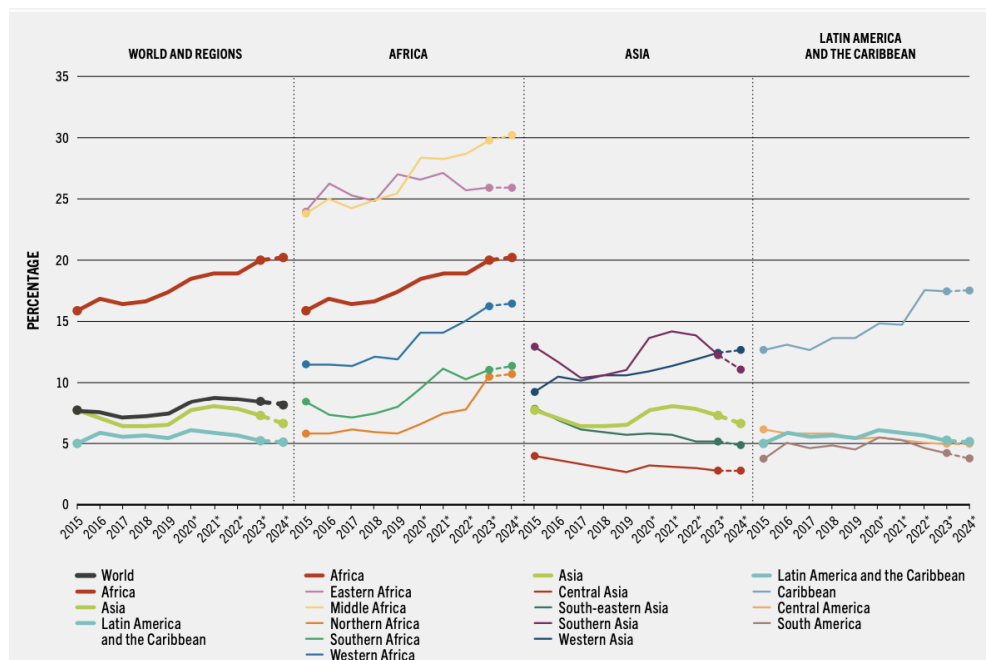
Abstract

The increasingly alarming global food security crisis has prompted various countries to strengthen international cooperation in the agricultural sector, including South Korea through the *K-Rice Belt* initiative in 2023. This study aims to analyze the *K-Rice Belt* initiative as an instrument of South Korea's foreign policy in agricultural cooperation in Africa in 2023. The research method employed is descriptive qualitative with literature study as the data collection technique, along with qualitative data analysis of various documentation sources, scientific journals, and relevant official reports. This study uses Lancaster's foreign aid theory as the analytical framework. The results indicate that *K-Rice Belt* is a multidimensional instrument of South Korea's foreign policy, encompassing diplomatic objectives in strengthening South Korea's position as a global pivotal state in Africa, developmental and humanitarian objectives through agricultural technology transfer to eight partner countries, and commercial objectives through the development of a Korean technology-based agricultural ecosystem in Africa. This study concludes that the *K-Rice Belt* reflects South Korea's strategy of leveraging its comparative advantage in the agricultural sector as capital to strengthen its international influence in Africa.

Key words: Africa, *K-Rice Belt*, Foreign policy, Foreign aid, South Korea

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan global dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu isu utama dari agenda pembangunan berkelanjutan. Krisis iklim, ledakan populasi, pandemi COVID-19, hingga konflik geopolitik Rusia-Ukraina secara kolektif memperburuk akses dan ketersediaan pangan secara global. Pandemi COVID-19 diperkirakan menyumbang 90 juta jiwa tambahan yang mengalami kelaparan dalam rentang 2019–2020 akibat terganggunya rantai pasokan pangan dan aktivitas pertanian (FAO, 2023). Konflik Rusia-Ukraina turut memperparah situasi ini mengingat kedua negara berkontribusi 12% ekspor kalori makanan dunia, sehingga perang yang berlangsung sejak Februari 2022 secara langsung mengganggu pasokan gandum, jagung, dan pupuk global (Caprile, 2022). Dampak berlapis ini paling dirasakan oleh negara-negara *Global South*, khususnya kawasan Afrika yang hingga kini masih menghadapi tantangan ketahanan pangan yang serius (FAO, 2023).



Gambar 1.1 Grafik Tren Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Global dan Regional Tahun 2015–2024
Sumber: (FAO et al., 2025)

Kondisi ketahanan pangan di Afrika menjadi yang paling mengkhawatirkan dibandingkan kawasan lain di dunia. Berdasarkan laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* (SOFI) yang diterbitkan FAO et al. (2025), Afrika menunjukkan tren lonjakan angka kekurangan gizi kronis yang terus meningkat sejak 2015 hingga diproyeksikan mencapai 20,2% pada 2024, sementara kawasan lain mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan (lihat Gambar 1.1). Produktivitas pertanian Afrika terbilang sangat rendah dengan rata-rata hanya 300–500 kg/ha, jauh tertinggal dibandingkan Amerika yang dapat mencapai 2,5 ton/ha, dan lebih dari 257 juta jiwa atau sekitar 20% total populasi Afrika mengalami gizi buruk (FAO, 2023). Situasi ini diperburuk oleh tingginya ketergantungan Afrika terhadap impor beras, di mana permintaan beras meningkat empat kali lipat dalam rentang 1990 hingga 2018 dan impor beras Afrika melonjak 3,4 kali lipat dari 4,99 juta ton pada 2000 menjadi 17,12 juta ton pada 2023 (Amameishi, 2026).

Upaya peningkatan ketahanan pangan di Afrika tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Afrika sendiri, tetapi juga melibatkan berbagai aktor internasional dengan pola keterlibatan yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara historis, keterlibatan aktor eksternal di Afrika didominasi oleh negara-negara Barat yang mewarisi hubungan struktural

dari era kolonial, namun meskipun Afrika telah menerima bantuan luar negeri dalam jumlah besar untuk industrialisasi, pengentasan kemiskinan, dan tata kelola, pembangunan ekonomi berkelanjutan di benua ini belum sepenuhnya tercapai. Memasuki awal tahun 2000-an, pola keterlibatan di Afrika mulai bergeser dengan semakin kuatnya kehadiran China sebagai aktor baru yang dominan, di mana volume investasi langsung China di Afrika melonjak drastis dari 100 juta dolar AS pada tahun 2000 menjadi lebih dari 1 miliar dolar AS pada 2006, dan jumlah proyek investasinya tumbuh hingga lebih dari 9.000 proyek pada 2022 (Tongze et al., 2025). Dalam perkembangan terbaru, Korea Selatan juga mulai memperluas keterlibatannya di Afrika melalui program *foreign aid* di sektor pertanian, salah satunya melalui peluncuran *K-Rice Belt* pada 2023 sebagai bagian dari strategi *Global Pivotal State* pemerintahan Yoon Suk Yeol (Seoyoung, 2024). Pergeseran pola keterlibatan berbagai aktor internasional ini menunjukkan bahwa Afrika telah berkembang menjadi arena kerja sama sekaligus persaingan pengaruh antar negara dalam konteks pembangunan dan bantuan luar negeri global.

Korea Selatan ikut hadir menginisiasikan kerja sama di sektor pertanian Afrika melalui proyek *K-Rice Belt*. *K-Rice Belt* merupakan bagian dari proyek *Official Development Assistance* (ODA) Korea Selatan yang MoU-nya ditandatangani pada 10 Juli 2023 oleh *Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs* (MAFRA) bersama delapan negara Afrika, dengan tujuan meningkatkan produktivitas beras melalui benih padi Korea berkualitas tinggi, pembangunan sistem irigasi, bantuan teknis, dan peralatan pertanian (Seoyoung, 2024). Pemerintah Korea Selatan mengalokasikan lebih dari 80 juta dolar AS untuk mendanai proyek ini, dengan target produksi 2.000 ton beras pada tahun pertama dan diproyeksikan meningkat menjadi 10.000 ton pada 2027, yang diharapkan mencukupi kebutuhan pangan 30 juta jiwa per tahun (Ursu, 2023). Program ini tidak hanya berperan dalam mengatasi krisis pangan Afrika, tetapi juga menjadi pijakan Korea Selatan untuk memperluas pengaruh diplomatik dan ekonominya di Afrika sebagai mitra strategis yang penuh potensi di masa depan (Kim, 2026).

Dalam kajian hubungan internasional, praktik pemberian bantuan pembangunan dapat dipahami melalui konsep *foreign aid*. *Foreign aid* merujuk pada transfer sumber daya publik secara sukarela dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau lembaga non-pemerintah dengan tujuan mendukung perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di negara penerima. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan finansial, bantuan teknis, transfer teknologi, maupun pembangunan kapasitas yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lancaster, 2007). Lebih lanjut, bantuan luar negeri tidak hanya didorong oleh motif pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis negara donor. Lancaster menjelaskan bahwa *foreign aid* dapat memiliki berbagai tujuan, seperti tujuan pembangunan, diplomatik, kemanusiaan, dan ekonomi. Oleh karena itu, bantuan luar negeri sering berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang memungkinkan negara donor memperkuat hubungan bilateral, memperluas pengaruh diplomatik, serta menciptakan peluang kerja sama ekonomi dengan negara penerima bantuan (Lancaster, 2007).

Penggunaan *foreign aid* sebagai instrumen kebijakan luar negeri tidak hanya dilakukan oleh Korea Selatan, tetapi juga telah menjadi pola umum di antara aktor-aktor internasional besar. Amerika Serikat melalui program *Feed the Future* mengintegrasikan pembangunan pertanian ke dalam strategi geopolitiknya yang lebih luas untuk memperkuat posisi dan kemitraan internasional di negara-negara berkembang (USAID, 2022). Uni Eropa pun menunjukkan pola serupa melalui *Global Gateway* yang diluncurkan Desember 2021, di mana Van Wieringen (2024) menjelaskan bahwa inisiatif ini sesungguhnya merupakan instrumen kebijakan luar negeri baru Uni Eropa yang bermotivasi geopolitik kuat, dirancang untuk menandingi pengaruh China melalui *Belt and Road Initiative* sekaligus memperkuat posisi Eropa di kawasan *Global South* termasuk Afrika, yang menunjukkan bahwa Afrika telah menjadi arena persaingan pengaruh nyata di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji *foreign aid* Korea Selatan dan China di Afrika dari berbagai perspektif. Mtumbuka et al. (2021) menemukan bahwa program KAFACI yang berjalan sejak 2010 terbukti meningkatkan perdagangan bilateral Korea-Afrika,

mengindikasikan bahwa *foreign aid* Korea di sektor pertanian sejak awal sudah membawa kepentingan strategis di luar tujuan pembangunan semata. Nicolas (2020) menambahkan bahwa *foreign aid* Korea Selatan di Afrika masih terfragmentasi antara *soft power* dan kepentingan komersial tanpa strategi yang koheren, sementara Cheng, Mawdsley, dan Liu (2022) menunjukkan bahwa China justru telah lebih sistematis melalui strategi *creative involvement* dalam FOCAC dengan menjadikan *foreign aid* pertanian sebagai instrumen kebijakan luar negerinya di Afrika. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis K-Rice Belt 2023 sebagai instrumen *foreign aid* Korea Selatan di Afrika, khususnya dalam konteks meningkatnya persaingan pengaruh global di kawasan Afrika. Berbeda dari program *Official Development Assistance* (ODA) sebelumnya, yakni program KAFACI melakukan riset teknis agronomi dengan melakukan kerja sama lembaga internasional seperti *Africa Rice* dan *International Rice Research Institute* (IRRI). Sedangkan K-Rice Belt merupakan bentuk manifestasi dari strategi *Global Pivotal State* (GPS), dengan menyediakan benih padi berkualitas dan transfer teknologi pertanian. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana K-Rice Belt difungsikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam kerja sama pertanian Afrika pada tahun 2023.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemaparan secara sistematis dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan luar negeri Korea Selatan melalui studi kasus *K-Rice Belt Initiative* di Afrika tahun 2023, sehingga memerlukan pemahaman kontekstual yang komprehensif terhadap dinamika kebijakan, aktor, serta kepentingan yang terlibat. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian untuk membatasi ruang lingkup analisis agar lebih terarah pada satu fenomena spesifik, yaitu *K-Rice Belt* sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang tercermin pada *K-Rice Belt Initiative* di Afrika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen organisasi internasional, serta publikasi akademik yang relevan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan kriteria seleksi literatur yang ketat, yaitu menggunakan jurnal bereputasi dalam 5-10 tahun terakhir, mengutamakan laporan resmi lembaga kredibel seperti FAO, OECD, *World Bank*, dan MAFRA, serta hanya memilih sumber dengan kejelasan penulis dan metodologi, sekaligus mengecualikan sumber yang tidak terverifikasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan langsung dengan analisis *foreign aid* dan konteks Afrika. Data yang telah diseleksi kemudian dikategorikan secara tematik berdasarkan kerangka teori Lancaster, yang mencakup tujuan diplomatik, pembangunan, kemanusiaan, dan komersial (Lancaster, 2007). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur untuk memperjelas hubungan antar variabel dan memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori, sehingga menghasilkan analisis yang logis, kritis, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014).

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *foreign aid* yang dikemukakan oleh Carol Lancaster untuk memahami bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang bersifat strategis dan multidimensional. Lancaster mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer sumber daya publik secara sukarela dari pemerintah suatu negara kepada negara lain atau organisasi internasional dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan di negara penerima (Lancaster, 2007). Namun, Lancaster menekankan bahwa bantuan luar negeri

tidak dapat direduksi hanya sebagai upaya pembangunan, melainkan merupakan alat politik yang digunakan negara donor untuk mencapai berbagai kepentingan. Dalam perspektif ini, *foreign aid* harus dipahami sebagai bagian dari praktik hubungan internasional yang mencerminkan interaksi antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global.

Lebih lanjut, Lancaster mengidentifikasi bahwa bantuan luar negeri umumnya mengandung beberapa tujuan utama yang hadir secara simultan, yaitu tujuan diplomatik, pembangunan, kemanusiaan, dan komersial (Lancaster, 2007). Tujuan diplomatik berkaitan dengan upaya memperluas pengaruh dan memperkuat relasi bilateral, sementara tujuan pembangunan dan kemanusiaan berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan penanganan krisis di negara penerima. Di sisi lain, tujuan komersial mencerminkan kepentingan ekonomi negara donor dalam membuka akses pasar dan memperluas jaringan ekonomi global. Dengan demikian, pendekatan Lancaster memberikan kerangka analisis yang kritis untuk melihat bahwa bantuan luar negeri, termasuk *K-Rice Belt Initiative*, tidak bersifat netral, melainkan merupakan instrumen yang merefleksikan kombinasi kepentingan strategis negara donor dalam konteks politik global yang kompetitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi Korea Selatan Memberikan Bantuan Pertanian melalui *K-Rice Belt*

Akhir perang dunia II, Korea termasuk ke dalam daftar negara termiskin di dunia. Pada tahun 1950-an, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Korea Selatan dengan penderitaan yang dialami yakni rendahnya produktivitas dan kemiskinan. Selain itu, sebagian besar petani yang ada di Korea Selatan merupakan petani kecil seperti yang ada di negara-negara Afrika. Merespon permasalahan yang ada, pemerintah Korea pada tahun 1960 mengembangkan dan mempromosikan sektor pertanian sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan perekonomian nasional. Keberhasilan ekonomi dan industrialisasi Korea Selatan dapat dikatakan bermula dari transformasi sektor pertanian, yakni tercapainya swasembada pangan khususnya beras Korea (pangan pokok). Pemerintah Korea Selatan dalam satu dekade, berhasil memutus rantai kelaparan yang secara berulang dialami rakyatnya melalui pendekatan *Green Revolution* secara komprehensif melibatkan semua tingkatan pemerintah, publik, dan swasta (Park, 2019).

Perjalanan sejarah Korea Selatan dalam swasembada beras ditandai dengan pengembangan beras "Tong-il" di awal tahun 1970-an. Pasca kerawanan pangan yang terjadi, Korea Selatan berinvestasi secara besar-besaran dalam penelitian di sektor pertanian dan penyuluhan guna memperoleh kualitas beras berdaya hasil tinggi dengan melakukan kemitraan internasional. Benih padi unggulan yang dikembangkan yakni varietas tong-il berhasil memproduksi 30% lebih banyak dibandingkan jenis padi japonica. Varietas tong-il kemudian didistribusikan kepada petani lokal di pedesaan Korea Selatan dan berhasil meningkatkan produksi dari 3,2 juta ton tahun 1968 menjadi 4,9 juta ton pada tahun 1969 dan terus mengalami peningkatan mencapai 6 juta ton pada puncak green revolution di tahun 1977. Korea Selatan membutuhkan waktu satu dekade untuk benar-benar melepaskan diri dari krisis tersebut (Kim, 2026). Pada masa krisis tersebut Korea Selatan menjadi negara penerima bantuan internasional dari berbagai pihak, negara ini dapat dikatakan hancur pasca perang Korea (1950-1953). Namun, Korea Selatan berhasil mengelola dana bantuan melalui proyek-proyek strategis guna mendorong pembangunan ekonomi domestik, sehingga dalam rentang waktu 50 tahun berhasil melakukan transformasi ekonomi, dan bergabung menjadi anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) bersama negara-negara maju lainnya (Marx & Soares, 2013). Korea Selatan merupakan contoh dimana suatu negara, yang mulanya negara penerima bantuan bertransisi menjadi pengeksport pangan dan teknologi yang strategis (Farmers Review Africa, 2023). Melalui pengalaman keberhasilan dalam pembangunan domestiknya, Korea mendapatkan reputasi positif sebagai aktor kredibel dalam kerja sama pembangunan internasional. Peran Korea sangat dihargai dan memungkinkan untuk memainkan peran penghubung utama di panggung global, khususnya pada isu-isu efektivitas pembangunan dan

pertumbuhan inklusif (OECD, 2021)

Dalam perspektif teori *foreign aid*, bantuan kemanusiaan (*humanitarian relief*) menjadi salah satu bantuan luar negeri yang paling tidak kontroversial dari semua tujuan (Yosdelina, 2022). Bantuan kerja sama K-Rice Belt ini merefleksikan sikap pemerintah Korea Selatan dalam mengadopsi norma internasional secara modern, dengan kata lain negara-negara maju memiliki beban tanggung jawab untuk ikut berkontribusi memperbaiki kondisi kemanusiaan di negara-negara berkembang atau miskin. Berbekal pengalaman historis, Korea memiliki pemahaman mendalam terkait kekhawatiran dan kebutuhan mitra penerima manfaat bantuan kerja sama bukan hanya sekedar penyaluran anggaran. Namun, keterlibatan dalam kemitraan di sektor-sektor strategis dalam upaya membangun hubungan saling percaya dengan tujuan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (OECD, 2021). Diluar dari faktor ketahanan pangan dan bantuan kemanusiaan, secara ekonomi K-rice belt memiliki peluang ekonomi yang luas dan mendorong jaringan perdagangan yang menguntungkan. Kerja sama ini dapat membuka kolaborasi diberbagai bidang, seperti penanggulangan perubahan iklim, manajemen rantai pasokan pangan, hingga pelayanan kesehatan (Fioretti, 2023). Inisiatif K-rice belt merupakan bentuk nyata dari visi *Global Pivotal State* (GPS) yang diusung oleh pemerintahan Presiden Yoon Seok Yeol, guna memperluas jaringan internasional dengan negara-negara yang memiliki nilai, identitas dan kepentingan strategis yang sama (Chung, 2023). Inisiatif K-rice belt ini juga menjadi bentuk pergeseran kebijakan luar negeri Korea melalui GPS, yang saat ini berambisi untuk tidak hanya berfokus pada isu disemenanjung Korea. Namun, beralih untuk memperluas pengaruh secara internasional melalui keterlibatan dalam isu-isu global (Ryu, 2023).

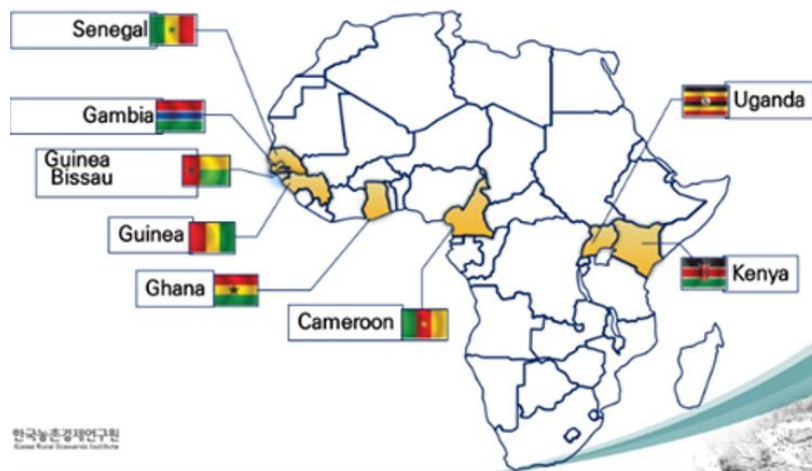
Bentuk dan Mekanisme Bantuan Pertanian dalam Program K-Rice Belt

Pelaksanaan inisiatif K-Rice Belt pada tahun 2023 merupakan salah satu bentuk implementasi bantuan pembangunan internasional Korea Selatan di sektor pertanian. Program ini dirancang sebagai bagian dari skema *Official Development Assistance* (ODA) yang disalurkan oleh pemerintah Korea Selatan kepada negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika. Melalui program ini, Korea Selatan berupaya mendukung peningkatan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, serta penguatan kapasitas produksi padi di negara-negara mitra (Nayoung, 2025). Dalam konteks hubungan internasional, bantuan pembangunan semacam ini tidak hanya dipahami sebagai upaya kemanusiaan atau pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kerja sama internasional yang dapat memperkuat hubungan antara negara donor dan negara penerima. Dalam kajian hubungan internasional, kerja sama pembangunan semacam ini sering dipahami sebagai bentuk *foreign aid*, yaitu transfer sumber daya dari negara donor kepada negara penerima yang bertujuan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara tersebut. Bantuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti dukungan finansial, transfer teknologi, maupun pembangunan kapasitas di sektor tertentu (Lancaster, 2007).

Dalam pelaksanaannya, program K-Rice Belt dikoordinasikan oleh *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) sebagai lembaga pemerintah Korea Selatan yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pertanian serta pengelolaan kerjasama pertanian internasional. Dalam pelaksanaannya, MAFRA bekerja sama dengan *Rural Development Administration* (RDA), yaitu lembaga penelitian pertanian nasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi pertanian dan inovasi varietas tanaman (Donghwan, 2025). Kolaborasi antara kedua lembaga ini menunjukkan bahwa program bantuan pertanian Korea Selatan tidak hanya berfokus pada transfer sumber daya material, tetapi juga melibatkan dukungan ilmiah dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan tersebut (Seungho, 2024).

RDA berperan dalam melakukan penelitian serta pengembangan varietas padi unggul yang dapat beradaptasi dengan kondisi agroekologi di berbagai wilayah Afrika. Selain itu, lembaga ini juga terlibat dalam pengujian adaptasi benih terhadap kondisi lingkungan lokal serta penyelenggaraan pelatihan bagi petani dan tenaga teknis pertanian di negara-negara mitra (Donghwan, 2026). Dengan demikian, implementasi program K-Rice Belt mencerminkan

pendekatan bantuan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan input produksi, tetapi juga pada transfer pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian dalam jangka panjang. Pada tahap awal implementasinya, Korea Selatan menjalin kerja sama dengan sejumlah negara Afrika melalui penandatanganan nota kesepahaman yang berkaitan dengan pengembangan produksi padi.



Gambar 2.1 Peta Sebaran Negara Mitra Program K-Rice Belt di Afrika **Sumber: KREI dalam (2024)**

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa negara mitra K-Rice Belt tersebar di kawasan Afrika, negara-negara yang terlibat dalam program *K-Rice Belt* pada tahun 2023 antara lain Senegal, Gambia, Guinea, Ghana, Kamerun, Uganda, Kenya, dan Guinea-Bissau KREI dalam (*The BFT Online*, 2024). Kerja sama tersebut diumumkan dalam pertemuan tingkat menteri pertanian yang diselenggarakan di Seoul pada Juli 2023. Melalui kesepakatan tersebut, negara-negara mitra Afrika memperoleh dukungan dalam bentuk penyediaan benih unggul, transfer teknologi pertanian, serta program pelatihan bagi petani lokal.

Salah satu bentuk bantuan utama dalam program *K-Rice Belt* adalah penyediaan benih padi unggul yang dikembangkan oleh lembaga penelitian pertanian Korea Selatan. Benih tersebut dirancang untuk memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lokal serta memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan (Taştan, 2023). Dalam sektor pertanian, ketersediaan benih unggul merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tanaman serta efisiensi produksi pertanian. Pada tahun pertama implementasi program ini, produksi benih padi unggul mencapai sekitar 2.321 ton yang dihasilkan melalui proyek produksi benih di enam negara Afrika, yaitu Ghana, Gambia, Senegal, Guinea, Kamerun, dan Uganda. Jumlah tersebut melampaui target awal produksi yang ditetapkan sebesar 2.040 ton. Benih yang diproduksi kemudian didistribusikan kepada petani lokal untuk digunakan dalam kegiatan budidaya padi di negara-negara tersebut. Pemerintah Korea Selatan juga menargetkan peningkatan produksi benih hingga sekitar 10.000 ton per tahun pada tahun 2027, yang diperkirakan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi sekitar 30 juta penduduk di Afrika (Seungho, 2024). Target ini menunjukkan bahwa program *K-Rice Belt* dirancang sebagai inisiatif jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Selain penyediaan benih unggul, program ini juga mencakup transfer teknologi pertanian sebagai bagian dari dukungan teknis kepada negara mitra. Transfer teknologi dilakukan melalui pengenalan berbagai metode budidaya padi modern yang dikembangkan di Korea Selatan, seperti teknik penanaman dengan produktivitas tinggi, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta penggunaan mesin pertanian modern (Seokmin, 2026). Untuk mendukung proses transfer teknologi tersebut, Korea Selatan juga membantu pembangunan fasilitas produksi benih padi di

negara-negara mitra Afrika (Sangdon, 2023). Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat produksi benih sekaligus sebagai sarana pengembangan teknologi pertanian di tingkat lokal. Keberadaan fasilitas produksi benih tersebut memungkinkan negara-negara mitra untuk mengembangkan kapasitas produksi benih secara mandiri dalam jangka panjang (Donghwan, 2025).

Selain dukungan teknologi dan infrastruktur, program *K-Rice Belt* juga menekankan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Pemerintah Korea Selatan menyelenggarakan berbagai program pelatihan bagi petani lokal serta tenaga teknis pertanian di negara-negara mitra Afrika. Pelatihan tersebut mencakup teknik budidaya padi modern, pengelolaan hama dan penyakit tanaman, penggunaan teknologi pertanian, serta manajemen pascapanen. Program ini juga melibatkan kerja sama antara peneliti pertanian Korea Selatan dengan lembaga penelitian pertanian di negara-negara Afrika (Seungho, 2024). Kerja sama penelitian ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Secara keseluruhan, mekanisme bantuan dalam program *K-Rice Belt* menunjukkan pendekatan pembangunan pertanian yang komprehensif, mencakup penyediaan input produksi, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem produksi pangan secara berkelanjutan di negara-negara mitra Afrika. Mekanisme implementasi program tersebut menunjukkan bahwa bantuan pertanian Korea Selatan tidak hanya berfungsi sebagai kerja sama pembangunan, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam hubungan antara Korea Selatan dan negara-negara Afrika. Oleh karena itu, bagian berikutnya akan menganalisis program *K-Rice Belt* melalui kerangka teori *foreign aid* yang dikembangkan oleh Lancaster untuk memahami bagaimana program ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan.

***K-Rice Belt* sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan**

Setelah membahas motivasi Korea Selatan dalam memberikan bantuan pertanian dan mekanisme teknis program *K-Rice Belt* pada sub bab sebelumnya, sub bab ini akan menganalisis bagaimana *K-Rice Belt* dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan melalui pendekatan teori bantuan luar negeri yang dikembangkan oleh Carol Lancaster. Lancaster (2007) berpendapat bahwa bantuan luar negeri tidak pernah digunakan hanya untuk satu tujuan saja, melainkan selalu merupakan campuran dari berbagai tujuan yang dipengaruhi oleh dinamika politik domestik negara pemberi. Lancaster mengidentifikasi tujuan-tujuan utama bantuan luar negeri yang meliputi tujuan diplomatik, pembangunan, kemanusiaan, dan komersial, di mana dalam praktiknya satu program bantuan dapat melayani beberapa tujuan tersebut secara bersamaan (Lancaster, 2007).

Salah satu tujuan utama bantuan luar negeri menurut Lancaster (2007) adalah tujuan diplomatik, yaitu penggunaan bantuan untuk memperkuat hubungan bilateral, membangun kemitraan strategis, dan meningkatkan pengaruh internasional negara pemberi. Tujuan diplomatik ini terlihat sangat jelas dalam program *K-Rice Belt*, terutama jika dikaitkan dengan visi kebijakan luar negeri Presiden Yoon Suk Yeol yang mengusung konsep Korea Selatan sebagai *Global Pivotal State* (GPS). Konsep GPS sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Yoon saat kampanye pemilihan presiden 2022, di mana ia menegaskan bahwa Korea Selatan seharusnya tidak lagi hanya terfokus pada urusan Semenanjung Korea, tetapi harus tampil sebagai negara yang berkontribusi aktif dalam perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran global (Yeo, 2023). Dalam kerangka GPS inilah peningkatan program ODA Korea Selatan mendapatkan konteksnya. Peningkatan anggaran ODA sebesar 43% untuk tahun 2024, mencapai \$5,2 miliar, sebagai wujud nyata dari ambisi Korea Selatan untuk memperluas peran internasionalnya (Yeo, 2023). Lebih jauh lagi, Korea Selatan secara aktif memperluas jaringan kemitraan dengan negara-negara *Global South*, termasuk Afrika, sebagai bagian dari strategi GPS yang lebih besar. Dengan demikian, *K-Rice Belt* bukan sekadar program ODA yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari strategi diplomatik Korea Selatan untuk membangun kehadiran

dan pengaruh di Afrika sebagai kawasan yang semakin diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar dunia.

Program *K-Rice Belt* dirancang untuk membangun fasilitas produksi benih padi lokal di delapan negara Afrika, menyediakan varietas padi unggul dengan hasil panen dua hingga tiga kali lebih tinggi dari varietas lokal, membangun sistem irigasi, serta melakukan transfer teknologi budidaya secara langsung kepada petani setempat (Farmers Review Africa, 2023). Korea Selatan menargetkan produksi sekitar 2.000 ton benih padi pada tahap awal program, dengan target peningkatan hingga lebih dari 10.000 ton per tahun mulai 2027 kapasitas yang diproyeksikan mampu mendukung kebutuhan pangan sekitar 30 juta penduduk Afrika (Farmers Review Africa, 2023). Pendekatan berbasis kapasitas ini sesuai dengan konsep tujuan pembangunan Lancaster (2007) yang menekankan pentingnya program bantuan yang menghasilkan dampak struktural jangka panjang, bukan ketergantungan.

Dimensi kemanusiaan program ini juga didukung oleh konteks krisis pangan Afrika yang nyata. Pada tahun 2021, negara-negara Afrika mengalami defisit impor pangan bersih sebesar \$39 miliar, sementara lebih dari 257 juta jiwa mengalami gizi buruk (Okech, 2025). Dalam konteks ini, respons Kenya menjadi menarik untuk dicermati. Menteri Pertanian Kenya Mithika Linturi menyatakan bahwa *K-Rice Belt* akan sangat membantu Kenya dan negara-negara mitra untuk mencapai ketahanan pangan, dengan menyebut Korea Selatan sebagai model negara yang berhasil bertransformasi dari penerima bantuan pangan menjadi eksportir (Farmers Review Africa, 2023). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dimensi pembangunan dan kemanusiaan program ini dipersepsi secara positif dan nyata oleh negara-negara penerima, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi program *K-Rice Belt* di mata komunitas internasional. Selain tujuan diplomatik, pembangunan, dan kemanusiaan, Lancaster (2007) juga mengidentifikasi tujuan komersial sebagai salah satu tujuan penting bantuan luar negeri. Tujuan komersial ini mencakup penggunaan bantuan untuk membuka peluang ekonomi, memperluas akses pasar, dan membangun hubungan ekonomi yang menguntungkan negara pemberi dalam jangka panjang. Dalam konteks *K-Rice Belt*, dimensi komersial ini mungkin tidak terlihat secara eksplisit, namun terstruktur dengan rapi dalam desain program.

Korea Selatan mengalokasikan anggaran sebesar \$80 juta untuk program *K-Rice Belt* hingga 2027, sebuah investasi yang tidak hanya bertujuan kemanusiaan, tetapi juga strategis secara ekonomi (Farmers Review Africa, 2023). Melalui program ini, Korea Selatan membangun ekosistem pertanian di delapan negara Afrika yang bergantung pada varietas benih, mesin pertanian, dan teknologi budidaya Korea. Pertanian Korea mencatat bahwa pergeseran fokus Korea ke Afrika dalam program bantuan pertanian juga didorong oleh kepentingan nasional dalam mendapatkan akses lebih besar ke pasar ekspor dan sumber daya alam Afrika (Hyejin, 2017). Pola ini sangat konsisten dengan apa yang terjadi melalui *K-Rice Belt*. Afrika merupakan kawasan dengan potensi pasar yang sangat besar, dengan populasi yang diproyeksikan mencapai 2 miliar jiwa pada tahun 2050 (Okech, 2025). Dengan membangun kehadiran melalui program ODA pertanian sekarang, Korea Selatan sedang menanamkan modal relasional dan teknis yang dapat menghasilkan peluang komersial di masa depan sebuah strategi yang sangat sesuai dengan logika tujuan komersial bantuan luar negeri dalam kerangka Lancaster (2007). Selain itu, Yeo (2023) juga mencatat bahwa di bawah visi GPS, Korea Selatan secara aktif berupaya membangun kemitraan ekonomi dengan kawasan-kawasan berkembang termasuk Afrika, yang semakin memperkuat dimensi komersial di balik program *K-Rice Belt* ini.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa *K-Rice Belt* merupakan instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan yang bekerja secara multidimensional. Dalam kasus *K-Rice Belt*, ketiga dimensi diplomatik, pembangunan/kemanusiaan, dan komersial hadir secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain. Secara diplomatik, *K-Rice Belt* memperkuat posisi Korea Selatan sebagai *Global Pivotal State* yang aktif berkontribusi di kawasan Afrika. Secara pembangunan dan kemanusiaan, program ini memberikan dampak nyata melalui peningkatan kapasitas produksi beras dan transfer teknologi pertanian kepada delapan negara mitra. Secara komersial, program ini membangun fondasi ekosistem pertanian berbasis teknologi

Korea yang membuka peluang ekonomi jangka panjang di pasar Afrika. Program ini juga menempatkan Korea Selatan bukan hanya sebagai negara donor yang peduli terhadap krisis pangan Afrika, tetapi juga sebagai aktor internasional yang semakin asertif dalam membangun pengaruh globalnya melalui instrumen bantuan luar negeri yang terencana dan multidimensional. Dengan demikian, *K-Rice Belt* dapat disimpulkan sebagai salah satu manifestasi paling konkret dari kebijakan luar negeri Korea Selatan di era Presiden Yoon, di mana bantuan pertanian digunakan secara strategis untuk mencapai berbagai tujuan nasional sekaligus sebuah pendekatan yang sepenuhnya sejalan dengan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Lancaster (2007) dalam memahami bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang kompleks dan multidimensional.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa K-Rice Belt merupakan instrumen kebijakan luar negeri Korea Selatan yang bersifat multidimensional, bukan sekadar program ODA di sektor pertanian. Melalui kerangka teori bantuan luar negeri Lancaster (2007), ditemukan bahwa program ini secara bersamaan melayani empat tujuan sekaligus. Pertama, tujuan diplomatik yang terlihat dari bagaimana K-Rice Belt menjadi wujud nyata visi *Global Pivotal State* (GPS) Presiden Yoon Suk Yeol dalam memperluas pengaruh Korea Selatan di Afrika sebagai kawasan yang semakin strategis. Kedua, tujuan kemanusiaan yang tercermin dari respons Korea Selatan terhadap krisis pangan Afrika, di mana lebih dari 257 juta jiwa mengalami gizi buruk dan defisit impor pangan mencapai 39 miliar dolar AS pada 2021. Ketiga, tujuan pembangunan yang diwujudkan melalui transfer teknologi pertanian dan penguatan kapasitas produksi beras jangka panjang di delapan negara mitra Afrika. Keempat, tujuan komersial yang terstruktur melalui pembangunan ekosistem pertanian berbasis teknologi Korea yang membuka peluang ekonomi strategis di pasar Afrika yang diproyeksikan mencapai 2 miliar jiwa pada 2050. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa K-Rice Belt bukan sekadar program bantuan pertanian biasa, melainkan instrumen kebijakan luar negeri yang terencana dan multidimensional sebuah perspektif yang belum banyak dikaji dalam literatur akademis sebelumnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas K-Rice Belt secara empiris ketika target produksi 10.000 ton benih per tahun pada 2027 mulai dapat diverifikasi, mengingat penelitian ini terbatas pada tahun peluncuran program sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjangnya. Selain itu, studi komparatif antara K-Rice Belt dengan program bantuan pertanian aktor lain di Afrika seperti Feed the Future milik Amerika Serikat atau inisiatif pertanian China di bawah FOCAC juga dapat memperkaya pemahaman mengenai posisi dan keunikan pendekatan Korea Selatan dalam lanskap bantuan pertanian global yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amameishi, S. (2026). *Food security and rice production potential in Africa: The future of the Coalition for African Rice Development (CARD)*. JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development, 14. https://www.jica.go.jp/english/jica_ri/publication/knowledge/_icsFiles/afieldfile/2026/02/27/Knowledge_Report_No.14_en.pdf
- Brautigam, D. (2019). A critical look at Chinese 'debt-trap diplomacy': The rise of a meme. *Area Development and Policy*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1689828>
- Caprile, A. (2022). *Russia's war on Ukraine: Impact on food security and EU response*. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729367/EPRS_ATA\(2022\)729367_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729367/EPRS_ATA(2022)729367_EN.pdf)
- Cha, W. (2024). *Country partnership strategy in improved rice seed production and distribution in*



- 7 African countries. KREI.
<https://www.krei.re.kr/eng/page/120?cmd=view&biblioid=533874&pageIndex=1>
- Cheng, H., Mawdsley, E., & Liu, W. (2022). Reading the Forum on China–Africa Cooperation (2000–2021): Geoeconomics, governance, and embedding ‘creative involvement’. *Area Development and Policy*, 8(1), 60–83. <https://doi.org/10.1080/23792949.2022.2092018>
- Chung, K. (2023, November 4). South Korea’s quest to become a global pivotal state. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/11/south-koreas-quest-to-become-a-global-pivotal-state/>
- Crowder, L. V., Lindley, W., Truelove, W., Ilbuodo, J. P., & Castello, R. D. (1998). *Knowledge and information for food security in Africa: From traditional media to the Internet*. FAO. <https://www.fao.org/4/w9290e/w9290e00.htm>
- Dessalegn, H. (2023). Food security in Africa: Current efforts and challenges. *Foresight Africa* 2023. <https://www.brookings.edu/articles/food-security-strengthening-africas-food-systems/>
- Donghwan, K. (2025, April 15). *RDA promotes Korean agriculture diplomacy with developing nations*. The Korea Times. <https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20250415/rda-promotes-korean-agriculture-diplomacy-with-developing-nations?utm>
- Donghwan, K. (2026, February 26). *K-Ricebelt aims productivity to reach 6 tons per farm*. The Korea Times. <https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260226/govt-to-produce-11000-tons-of-seed-rice-in-africa-by-2027?utm>
- Eom, T. Y. (2024, September 19). Why Africa matters to South Korea’s Indo-Pacific strategy. *Asia Pacific Foundation of Canada*. <https://www.asiapacific.ca/publication/why-africa-matters-south-koreas-indo-pacific-strategy>
- FAO. (2023). CL 175/Intro Item 6: *The impact of the war in Ukraine on global food security and related matters under the mandate of the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). FAO. Retrieved March 17, 2026, from <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/no015en>
- FAO. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved January 08, 2026, from <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f1ee0c49-04e7-43df-9b83-6820f4f37ca9/content/state-food-security-and-nutrition-2023/food-security-nutrition-indicators.html>
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). *The state of food security and nutrition in the world 2025 – Addressing high food price inflation for food security and nutrition*.
- Farmers Review Africa. (2023, July 11). South Korea’s “K-Ricebelt project” initiative to help boost rice production in 8 African nations. Farmers Review Africa. <https://farmersreviewafrica.com/south-koreas-k-ricebelt-project-initiative-to-help-boost-rice-production-in-8-african-nations/>
- Fioretti, C. (2023, July 24). How the K-Rice Belt symbolizes South Korea’s economic aspirations in Africa. *Korea Pro*. <https://koreapro.org/2023/07/how-the-k-rice-belt-symbolizes-south-koreas-economic-aspirations-in-africa/>
- Hyejin, L. (2017). Trends in South Korea’s grants-based aid for agricultural sector in developing countries. *Journal of Rural Development*, 40, 125–144. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.266403>
- Joshua, A. S. (2023). Appraising the relationship between foreign aid on economic growth in Nigeria. *IIARD International Journal of Economics and Business Management*, 9(7), 105–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.56201/ijebm.v9.no7.2023.pg105.126>
- Kim, H. H. (2026). Seeds of change: A historical perspective on farming innovations and social outcomes in the K-Ricebelt of Africa. *Center for Open Science*. https://osf.io/preprints/socarxiv/dbsqk_v1
- Lancaster, C. (2007). *Foreign aid: Diplomacy, development, domestic politics*. University of



- Chicago Press.
- MAFRA. (2024). K-Rice Belt Project Briefing for Korean Companies: Purposes, Scales, RFB Process Timeline, Africa's Local Conditions, ETC. <https://www.mafra.go.kr/english/756/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGZW5nbGlzaCUyRj11JTJGNTY5NTMzJTJGYXJ0Y2xWaWV3LmRvJTNG>
- Marx, A., & Soares, J. (2013). South Korea's Transition from Recipient to DAC Donor: Assessing Korea's Development Cooperation Policy. *International Development Policy | Revue internationale de politique de développement*, 4(2), 107-142. <https://journals.openedition.org/poldev/1535>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nayoung, K. (2025, February 11). S. Korea to extend agriculture ODA programs to 50 countries by 2029: ministry. *Yonhap News Agency*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20250211003600320>
- Nicolas, F. (2020). *Korea in Africa: Between soft power and economic interests*. Institut Français des Relations Internationales. <https://www.ifri.org/en/studies/korea-africa-between-soft-power-and-economic-interests>
- OECD. (2021). *Korean Focus Areas: From emerging donor to global development partner*. OECD Publication. https://www.oecd.org/en/publications/korean-focus-areas_f91f3b75-en/from-emerging-donor-to-global-development-partner_66044045-en.html
- Ojokoh, B., Makinde, O., Fayeun, L., Babalola, O., Salako, K., & Adzitey, F. (2022). Impact of COVID-19 and lockdown policies on farming, food security, and agribusiness in West Africa. *Data Science for COVID-19*, 209-223. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90769-9.00014-1>
- Okech, M. (2025). *African Grain Market Report: Key Insights, Growth Drivers & Forecast*. *The African Exponent*. Retrieved January 08, 2026, from <https://www.africanexponent.com/african-grain-market-report-key-insights-growth-drivers-forecast/>
- Park, Y. H. (2019). Korea's development experience in the rice sector and its implications for Africa. *Korea Institute for International Economic Policy*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. <https://www.scribd.com/document/763735968/Metode-Penelitian-Ramadhan-2021>
- Ryu, Y. (2023). South Korea in 2022: Aspiring to become a global pivotal state? *East Asian Policy*, 15(1). https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S1793930523000016?srsid=AfmBOoo-OZd42sOhbzc5xaxbr4zDP1YERYwjjo4j1_4oUqwnDH11Pql
- Salsabilla, A. (2025). Peran Food and Agriculture Organization (FAO) dalam upaya mengatasi krisis pangan di Ukraina tahun 2022-2023. *JOM Fisip*, 12(1).
- Sangdon, J. (2023). Building K-Rice Belt in 8 African Countries... "Producing Rice for 30 Million Consumers Annually. *The Asia Business Daily*. <https://view.asiae.co.kr/en/article/2023071408084497151>
- Scoones, I., Amanor, K., Favareto, A., & Qi, G. (2016). A new politics of development cooperation? Chinese and Brazilian engagements in African agriculture. 81, 1-12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.020>
- Seokmin, O. (2026). (2nd LD) S. Korea launches 'K-rice belt' initiative with 8 African nations. *Yonhap News Agency*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20230710004352320>
- Seoyoung, K. (2024). *K-Rice Belt Initiative in Africa*. *Yonsei Annals*. <https://annals.yonsei.ac.kr/news/articleView.html?idxno=11209>
- Seungho, C. (2024). Video-based Education for K-Ricebelt: Korea Transfers Know-how for Rice Yield Enhancement to African Farmers. *mafra.go.kr*. <https://mafra.go.kr/bbs/english/25/570981/artclView.do?utm>
- Taştan, N. (2023). South Korea launches 'K-rice belt' initiative for food security of African nations.



- Anadolu Ajansı. <https://www.aa.com.tr/en/africa/south-korea-launches-k-rice-belt-initiative-for-food-security-of-african-nations/2942099>
- Tongze, G., Guanpeng, D., Dongyang, Y., & Dexin, L. (2025). Chinese investment promoted economic growth while reducing inequality in African countries. *Journal of Geographical Sciences*, 35(6), 1263-1285. <https://doi.org/10.1007/s11442-025-2366-8>
- The B&FT Online. (2024, April 12). *K-Ricebelt project: Transferring expertise and technology to feed Africa*. <https://thebftonline.com/2024/04/12/k-ricebelt-project-transferring-expertise-and-technology-to-feed-africa/>
- Ursu, S. (2023). South Korea launches “K-Rice Belt” initiative with 8 African countries. *development aid*.
- USAID. (2022). *U.S. government global food security strategy*. [Report]. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/usa225988.pdf>
- Whang, T., McLean, E. V., & Yu, C. (2024). How bureaucratic competition shapes foreign aid allocation: The case of South Korea's aid agencies. *Journal of International Development*, 37(1), 129-149. <https://doi.org/10.1002/jid.3952>
- Wieringen, K. v. (2024). *Global Gateway 2030 Future of Europe's global infrastructure bid*. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA\(2024\)757826](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2024)757826)
- World Bank Group. (2022). World Bank approves \$2.3 billion program to address escalating food Insecurity in Eastern and Southern Africa. *World Bank Group*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/21/world-bank-approves-2-3-billion-program-to-address-escalating-food-insecurity-in-eastern-and-southern-africa>
- Yeo, A. (2023). South Korea as a global pivotal state. *Brookings*. Retrieved March 9, 2026, from <https://www.brookings.edu/articles/south-korea-as-a-global-pivotal-state/>
- Yosdelina, R. (2022). Kepentingan Kanada memberi bantuan ke Indonesia melalui Trade Private Sector Assistance (TPSA) PROJECT. *JOM FISIP*, 9(1), 4. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/viewFile/32547/31331>